



Analisis Kinerja Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah: Studi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Analyzing Budget Absorption Performance in Local Government: The South Sumatra Experience

Nabila Fitri Alif¹, Sukmini Hartati², Jovan Febriantoko³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurusan Akuntansi, Palembang, Indonesia

Email: [*nabillaalifiah26@gmail.com](mailto:nabillaalifiah26@gmail.com)¹, sukmini_hartati@polsri.ac.id²,
jovan.febriantoko@polsri.ac.id³

Article Info

Article history:

Received: 01 Agustus 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 04 Januari 2026

Keywords: *budget; human resources; regional financial regulation; financial system; regional government*

DOI: 10.37859/jae.v15i2.9931

JEL Classification: *H83, H11, C83*

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, regulasi keuangan daerah, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan metode kuantitatif, data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh sebanyak 164 responden yang berasal dari 41 Perangkat Daerah dan dianalisis dengan IBM SPSS versi 26. Hasil menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan Pemahaman terhadap sistem dan prosedur memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran, sementara regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, pemahaman regulasi, dan penguasaan sistem keuangan untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

This study examines the influence of human resource quality, regional financial regulations, and understanding of financial management systems and procedures on budget absorption in the Provincial Government of South Sumatra. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires completed by 164 respondents from 41 regional agencies and analyzed using IBM SPSS version 26. The results show that the quality of human resources and understanding of financial systems and procedures have a significant positive effect on budget absorption. In contrast, regional financial regulations do not have a significant effect. However, collectively, the three variables have a significant simultaneous influence. These findings highlight the importance of improving competency, regulatory comprehension, and mastery of financial systems to enhance the effectiveness of budget implementation.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia melimpahkan otoritas yang besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan. pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam bidang fiskal. Salah satu bentuk nyata dari kewenangan ini merupakan terbentuknya prosedur penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah (APBD) yang bertujuan guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik (Bumulo et al. 2018). Efektivitas pelaksanaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh perencanaan yang akurat, melainkan juga oleh seberapa tinggi tingkat realisasi anggaran yang dicapai. Penyerapan anggaran menjadi indikator penting yang merefleksikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan program-program Pembangunan (Sutono et al., 2022).

Fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir (2019–2023), penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang mencerminkan ketidakseimbangan antara besarnya alokasi anggaran dan realisasinya. Meskipun alokasi anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, realisasi anggaran tidak menunjukkan peningkatan proporsional. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran mencapai 90,78%, namun menurun menjadi 87,33% pada tahun 2020 karena dampak pandemi. Meskipun tahun 2022 mencatat pemulihan dengan tingkat penyerapan 92,68%, pada tahun 2023 justru terjadi penurunan kembali menjadi 86,13%, yang merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir (Tempo, 2023). Selain itu, pola penyerapan anggaran per triwulan menunjukkan kecenderungan *slow backloaded*, yaitu pada awal tahun, pemanfaatan anggaran berlangsung lambat, namun mengalami lonjakan yang tajam di penghujung tahun, yang berpotensi mengganggu kualitas pelaksanaan program dan belanja.

Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran tidak terlepas dari unsur lingkup institusi baik dari dalam dan luar. Undur dari dalam merupakan yang paling dominan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menjalankan sistem serta prosedur keuangan daerah, ketidaksesuaian regulasi atau perubahan peraturan yang terjadi secara cepat, serta kurangnya penguasaan teknis terhadap sistem keuangan yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek manajerial dan kompetensi aparatur.

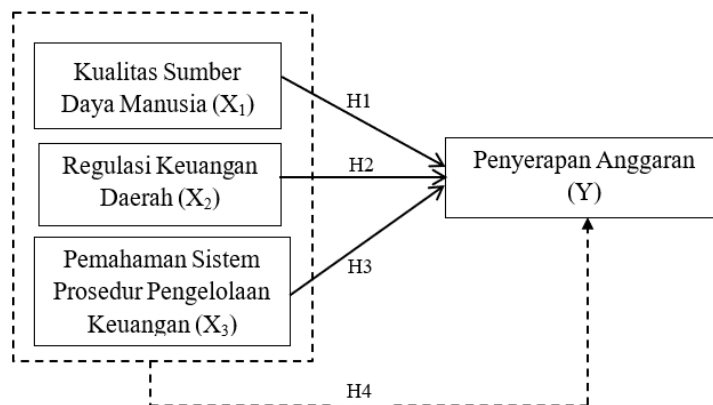
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia, regulasi keuangan daerah, dan pemahaman terhadap sistem prosedur pengelolaan keuangan memengaruhi efektivitas realisasi anggaran. Permasalahan tersebut menjadi relevan karena capaian penyerapan anggaran yang rendah dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan berkurangnya manfaat langsung bagi masyarakat (Delia et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat memberikan gambaran empiris dan solusi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas manajemen keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Studi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak dari mutu sumber daya manusia, regulasi keuangan daerah, Serta pemahaman terhadap sistem dan tata kelola keuangan daerah terhadap tingkat realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Secara praktikal, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang berperan dalam manajemen keuangan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam kerangka teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menerangkan keterkaitan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah) dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi penyerapan anggaran. Juliani & Sholihin (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM dan pemahaman regulasi berperan penting dalam percepatan realisasi anggaran. Astuti & Fadjaranie (2024) menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat tergantung

pada kapasitas teknis individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Handayani et al. (2022) menyoroti pentingnya penguasaan sistem keuangan berbasis teknologi, seperti aplikasi SAKTI, yang menuntut kecakapan teknis SDM dalam menghindari kendala operasional. Penelitian ini mengembangkan kajian sebelumnya dengan memasukkan variabel baru, yaitu pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan, serta memperluas objek penelitian ke seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana telah dijelaskan, hipotesis yang dikembangkan menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia, regulasi keuangan daerah, serta pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Selain itu, setiap variabel independen diasumsikan berkontribusi signifikan secara individu terhadap variabel yang dipengaruhi. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi substansial dalam merancang kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, adaptif, serta akuntabel.



Gambar 1. Struktur Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif berdesain deskriptif diterapkan dalam Studi ini. Metode yang berorientasi pada angka diterapkan sebagai metode kajian guna mengkaji sejauh mana pengaruh mutu sumber daya manusia, kebijakan keuangan daerah, serta pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2025 dan berlokasi di Kota Palembang. Subjek pada penelitian adalah Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, serta staf yang bertugas di bagian keuangan maupun perencanaan pada 41 Perangkat Daerah, dengan total responden sebanyak 164 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, skala pengukuran yang diterapkan dalam kuesioner ini mengacu pada skala likert dengan empat pilihan jawaban meliputi STS, TS, S, dan SS. Berikut ini adalah indikator untuk setiap variabel.

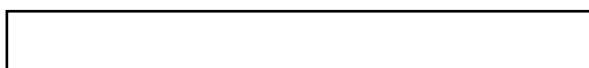
Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Penyerapan Anggaran (Y)	1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan	1.1 Anggaran instansi telah dilaksanakan sesuai prioritas. 1.2 Penyerapan anggaran instansi telah mencapai 90%.
	2. Realisasi triwulanan	1.3 Persentase peningkatan penyerapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
	3. Konsistensi pelaksanaan (Sukarningsih, 2022)	2. Penyerapan anggaran instansi telah proporsional setiap triwulan. 3. Instansi telah merumuskan anggaran yang selaras dengan tujuan program kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA).

Variabel	Dimensi	Indikator
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keahlian 3. Sikap (<i>Attitude</i>) (Sukarningsih, 2022) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pendidikan yang relevan dengan bidangnya. 1.2 Pengalaman dalam Manajemen Anggaran. 1.3 Kepatuhan terhadap SOP dan Peraturan. 1.4 Pemahaman Peraturan untuk Meminimalkan Kesalahan. 2.1 Pemberian Wewenang Berdasarkan Keahlian. 2.2 Penerapan Keahlian Sesuai Fungsi. 2.3 Pemanfaatan Teknologi dalam Pekerjaan. 2.4 Inovasi untuk Efektivitas dan Efisiensi. 2.5 Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan. 3.1 Penerapan Etika dan Kode Etik Karyawan 3.2 Penilaian Kedisiplinan Karyawan
Regulasi Daerah (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Regulasi 2. Regulasi yang Tumpang Tindih 3. Prosedur Operasi Standar (SOP) (Alimuddin, 2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Instansi akan melakukan sosialisasi jika menerima peraturan baru yang akan diterapkan. 1.2 Pemerintah Pusat terlambat mengumumkan atau mensosialisasikan peraturan baru. 1.3 Pemahaman terhadap peraturan penganggaran pemerintah daerah. 2.1 Peraturan dan ketentuan mengenai mekanisme penganggaran sering berubah. 2.2 Peraturan yang ditetapkan oleh instansi Anda tidak tumpang tindih. 2.3 Terdapat kendala atau hambatan dalam penyerapan anggaran akibat peraturan dan ketentuan yang sering berubah. 3. Instansi menyusun dan membuat prosedur operasi standar (SOP) untuk setiap program/kegiatan.
Pemahaman Prosedur Pengelolaan Keuangan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang sistem manajemen keuangan daerah 2. Keterampilan teknis dalam manajemen keuangan daerah (Muhammad 2016) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pemahaman dokumen dan formulir penganggaran. 1.2 Kemampuan pelaporan akuntansi keuangan daerah. 1.3 Pemahaman unsur pengendalian internal. 2.1 Kemampuan penyusunan RKA dan Laporan Pertanggungjawaban. 2.2 Pencatatan transaksi keuangan sesuai ketentuan.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda yang dijalankan melalui SPSS versi 26. Metode analisis data mencakup pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, analisis statistik deskriptif, serta uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tahapan berikutnya melibatkan penerapan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dan estimasi koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan model regresi linier berganda sebagaimana dirumuskan berikut ini.



$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Penjelasan:

Y = Penyerapan Anggaran

α = Nilai Konstanta

X1 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X2 = Regulasi Keuangan Daerah

X3 = Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam studi ini diperoleh melalui pembagian angket kepada sebanyak 164 responden dari 41 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari total tersebut, terdapat 140 kuesioner yang berhasil dikembalikan dan layak untuk diolah, sehingga tingkat pengembalian mencapai 85,37%. Capaian ini mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dari responden, serta memberikan dasar yang kuat bagi analisis data selanjutnya.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean
Penyerapan Anggaran (Y)	140	1	4	3,20
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	140	1	4	3,26
Regulasi Keuangan Daerah (X2)	140	1	4	3,06
Pemahaman Sistem Posedur Pengelolaan Keuangan (X3)	140	1	4	3,08

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Merujuk pada hasil analisis statistik uraian tabel 2 mengindikasikan bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut berdasarkan seluruh nilai rata-rata (mean), variabel pada analisis ini tergolong dalam kategori tinggi. Variabel Penyerapan Anggaran menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,20. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia mencatat rata-rata nilai paling tinggi sebesar 3,26. Variabel Regulasi Keuangan Daerah memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,06. Sementara itu, Variabel Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan mencatatkan nilai rata-rata sebesar 3,08. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap seluruh variabel yang diteliti.

Tabel 3. Uji Instrumen Data

Variabel	R-Statistic	R-Table	Cronbach's Alpha	Keterangan
Budget Absorption (Y)	0,550 – 0,785	0,166	0,903	Valid dan reliable
Quality of Human Resources (X1)	0,663 – 0,803	0,166	0,911	Valid dan reliable
Regional Financial Regulations (X2)	0,498 – 0,729	0,166	0,738	Valid dan reliable
Understanding the Financial Management Procedure System (X3)	0,800 – 0,855	0,166	0,878	Valid dan reliable

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3, seluruh item kuesioner memiliki r-statistik yang melebihi nilai r-tabel dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa seluruh butir pertanyaan sah dalam merepresentasikan variabel penelitian. Lebih lanjut, nilai koefisien Cronbach Alpha yang melebihi 0,70 pada setiap variabel menunjukkan bahwa keandalan alat ukur dalam riset ini tergolong sangat baik.

Tabel 4. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Keterangan
Test Statistic	0,096	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,003 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,140 ^d	Berdistribusi Normal

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Mengacu pada data Tabel 4 merupakan hasil dari penerapan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan metode Monte Carlo. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi residual dalam penelitian ini mencapai 0,140, yang memiliki nilai di atas level signifikansi 0,05. Hasil tersebut menandakan bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas dan Heteroskedasitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig. (Uji Glejser)	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,412	2,430	0,319	Tidak Terjadi Multikolinearitas dan Heteroskedasitas
Regulasi Keuangan Daerah (X2)	0,510	1,962	0,603	Tidak Terjadi Multikolinearitas dan Heteroskedasitas
Pemahaman Sistem Posedur Pengelolaan Keuangan (X3)	0,565	1,769	0,236	Tidak Terjadi Multikolinearitas dan Heteroskedasitas

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Hasil uji multikolinearitas membuktikan bahwa data tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Hal ini disebabkan oleh nilai toleransi untuk ketiga variabel di atas 0,10 Nilai Di samping itu, VIF ketiga variabel juga tercatat tidak lebih dari 10,00. Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan Glejser. Nilai signifikansi ketiga variabel yang melebihi 0,05 menunjukkan bahwa data bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Betta		
(Constant)	15.238	2.878		5.295	.000
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	.327	.107	.314	3.066	.003
Regulasi Keuangan Daerah (X2)	.217	.174	.115	1.245	.215
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan (X3)	.656	.189	.303	3.475	.001

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 6 menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$Y = 15,238 + 0,327 X1 + 0,217 X2 + 0,656 X3 + e$$

Konstanta sebesar 15,238 mengindikasikan bahwa ketika nilai semua variabel independen berada pada nol, maka tingkat penyerapan anggaran tetap tercatat sebesar 15,238. Nilai

koefisien regresi untuk variabel kualitas sumber daya manusia adalah 0,327, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian, setiap peningkatan satu satuan pada kualitas sumber daya manusia diperkirakan akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,327. Di sisi lain, koefisien regresi untuk variabel regulasi keuangan daerah sebesar 0,217 juga mengindikasikan hubungan positif. Artinya, setiap penambahan satu unit dalam regulasi keuangan daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,217. Sementara itu, variabel pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,656. Hal ini merefleksikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap sistem pengelolaan keuangan, maka semakin besar pula kenaikan penyerapan anggaran, yaitu sebesar 0,656.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary	
Adjusted R Square	0,401

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Dari pengujian terhadap koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square mencapai 0,401. Dengan demikian, sebesar 40,1% variasi pada penyerapan anggaran dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu kualitas SDM, peraturan keuangan daerah, dan pemahaman atas sistem pengelolaan keuangan. Sementara 59,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing faktor independen terhadap variabel yang menjadi sasaran analisis. Hasil Uji t yang ditampilkan dalam Tabel 6 diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui aplikasi SPSS, variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai *t hitung* sebesar 3,066. Jadi variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Variabel regulasi keuangan daerah (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,215 dengan nilai *t hitung* sebesar 1,245. Jadi variabel regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, variabel pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai *t hitung* sebesar 3,475. Jadi variabel pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1401.145	3	467.048	32.006	.000 ^b
	Residual	1984.598	136	14.593		
	Total	3385.743	139			

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Pengujian menghasilkan F hitung bernilai 32,006 ditunjukkan oleh signifikansi 0,000, yang menandakan bahwa hasilnya melebihi F tabel sebesar 2,67. Ini berarti hipotesis alternatif (H_4) diterima, menandakan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, regulasi keuangan daerah, pemahaman yang baik mengenai tata kelola sistem keuangan berkontribusi secara positif terhadap optimalisasi realisasi anggaran. Dengan arti lain, peningkatan pada ketiga faktor tersebut akan mendorong peningkatan penyerapan anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Temuan pada kajian ini mengindikasikan bahwa peningkatan mutu SDM secara nyata berkontribusi terhadap optimalisasi realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam mengelola proses penganggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa semakin tinggi kualitas SDM di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semakin besar potensi keberhasilan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Dari perspektif teori keagenan, kualitas SDM berperan sebagai instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Personel yang kompeten mampu memahami dan mematuhi prosedur penganggaran dengan disiplin, serta mampu mengambil keputusan yang mendukung tujuan organisasi. Analisis hasil deskriptif menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur operasi standar dan komitmen terhadap pengembangan kompetensi menjadi aspek yang relatif kuat dalam kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pendelegasian wewenang yang sesuai dengan keahlian aparatur, yang berpotensi menghambat fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diiringi dengan pengelolaan kewenangan yang lebih proporsional agar potensi aparatur dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan dapat menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kinerja aparatur publik dalam penyerapan anggaran, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Ananda dkk. (2022) dalam penelitian mereka di BPKAD Kota Palembang.

Studi ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam mendukung penyerapan anggaran yang efektif, sebagaimana dicatat oleh Subhiningsih dkk. (2023) di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan oleh Astuti & Fadjarenie (2024) di Kejaksaan Agung. Secara keseluruhan, studi ini memperkuat bahwa aspek kualitas individu dalam organisasi yang berkualitas tinggi, jika dimanfaatkan secara efektif, dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi operasional, dan keberhasilan realisasi pelaksanaan anggaran.

Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran

Berbeda dengan variabel sebelumnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa peraturan keuangan daerah tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Keadaan ini menandakan bahwa keberadaan regulasi tidak secara langsung mendorong peningkatan penyerapan anggaran. Regulasi yang dirujuk dalam penelitian ini mencakup aspek sosialisasi regulasi, tumpang tindih regulasi, dan pengembangan Prosedur Operasi Standar (SOP).

Secara teoritis, regulasi keuangan daerah berfungsi sebagai alat kontrol dalam hubungan keagenan antara *principal* dan *agent*. Namun, efektivitas regulasi sebagai instrumen kontrol sangat bergantung pada kejelasan muatan regulasi, stabilitas aturan, dan ketepatan waktu sosialisasi. Ketika regulasi mengalami perubahan yang relatif sering atau disosialisasikan secara terlambat, aparatur daerah cenderung menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar instansi telah memiliki prosedur operasi standar yang mendukung pelaksanaan anggaran. Namun, keterlambatan penyampaian regulasi baru dari pemerintah pusat masih menjadi kendala yang dirasakan oleh aparatur daerah. Ketika regulasi diterbitkan mendekati atau bahkan setelah tahun anggaran berjalan, maka proses adaptasi dan implementasi di tingkat daerah menjadi tidak optimal. Situasi ini mengakibatkan pelaksanaan anggaran terhambat karena ketidakpastian hukum dan administrasi, serta mempersulit satuan kerja dalam menyusun dan merealisasikan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, menjadi hal yang krusial bagi instansi pemerintah, baik di level nasional maupun regional, dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan

penyampaian regulasi dilakukan secara tepat waktu agar tidak mengganggu siklus pengelolaan anggaran di daerah.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Supraptana dan Sujana (2023) yang juga menunjukkan bahwa regulasi tidak memberikan dampak yang signifikan selama pandemi Covid-19, serta penelitian Nurbaverischa dkk. (2024) yang menemukan temuan serupa di OPD Kota Palembang. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa peran regulasi keuangan daerah dalam mendorong efektivitas pelaksanaan anggaran di Sumatera Selatan masih terbatas, terutama karena lemahnya implementasi dan seringnya terjadi perubahan ketentuan teknis.

Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil analisis mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dimensi yang diteliti meliputi pemahaman sistem pengelolaan keuangan daerah dan keterampilan teknis pencatatan dan pelaporan anggaran.

Dalam konteks teori keagenan, pemahaman sistem oleh *agent* (pemerintah daerah) sangat krusial untuk memastikan keselarasan pelaksanaan anggaran dengan harapan *principal* (masyarakat). Agen yang memiliki pemahaman memadai terhadap siklus anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan, bekerja lebih efisien, akuntabel, dan tepat waktu.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah memiliki kemampuan dalam pencatatan transaksi keuangan dan memahami pentingnya pengendalian internal. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman dokumen penganggaran, seperti rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman teknis melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas aparatur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi (2022) di Pemerintah Kabupaten Magelang dan Muhammad (2016) di Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pemahaman prosedur keuangan berkontribusi langsung terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Lebih lanjut, hasil ini memperkuat argumen Bandiyono dan Mayangsari (2021) bahwa meskipun tidak selalu signifikan secara statistik, pemahaman sistem akuntansi tetap krusial dalam proses pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik terhadap prosedur pengelolaan keuangan terbukti menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan penyerapan anggaran, terutama melalui peningkatan akuntabilitas, manajemen risiko, dan efektivitas pelaporan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai dengan mengerahkan pegawai yang memiliki kompetensi unggul terampil di bidangnya disertai dengan pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola keuangan daerah, mencakup proses dari pencatatan hingga penyusunan laporan. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi atau kebijakan keuangan daerah tidak memengaruhi tingkat realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyampaian peraturan oleh pemerintah pusat, yang pada gilirannya menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, menjadi hal yang krusial bagi instansi pemerintah, baik di level nasional maupun regional, dalam rangka

untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan penyampaian regulasi dilakukan secara tepat waktu agar tidak mengganggu siklus pengelolaan anggaran di daerah.

SARAN

Aspek koefisien determinasi menjadi salah satu batasan dalam penelitian ini. yang relatif rendah, yaitu 40,01%, menunjukkan bahwa elemen-elemen yang tidak termasuk dalam variabel yang menjadi fokus kajian ini berpotensi memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan realisasi anggaran. Berdasarkan keterbatasan ini, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi variabel independen dan variabel moderasi. Penggunaan variabel lain diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait berbagai determinan dari tingkat pelaksanaan anggaran. Beberapa variabel yang bisa dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya meliputi penyusunan anggaran, tahapan pengadaan barang serta jasa, komitmen pimpinan, sistem informasi dan teknologi, waktu pencairan DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) atau anggaran, dan tingkat perubahan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2018). *Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar* (Tesis, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28591/>
- Ananda, T. S. P., Maria, & Sari, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1, 68–74.
- Astuti, E. Y., & Fadjarenie, R. A. (2024). The Influence of Budget Planning, Human Resource Competence, and Budget Implementation on Budget Absorption Performance. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 248. <https://doi.org/10.29210/020244062>
- Bandiyono, A., & Mayangsari, S. (2021). The Role of Cash Planning in Budget Absorption: Perception Testing. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 201. <https://doi.org/10.24912/Ja.V25i2.806>
- Bumulo, R.M., Lambey, L., & Mawikare, L. M. (2018). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Belanja Langsung Pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 363-371.
- Delia, T., Syahril Djaddang, Suratno, & JMV. Mulyadi. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 116–131. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V4i1.77>
- Dewi, N. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi dan Pemahaman Sistem Prosedur Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38114>
- Handayani, K. S., Ni Kadek Sinarwati, & Putu Indah Rahmawati. (2022). The Effect of Budget Planning, Budget Implementation, and Human Resource Competencies on Budget Realization at Ganesha University of Education. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 438–445. <https://doi.org/10.23887/Ijssb.V6i3.44152>
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor – Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2014.10>
- Muhammad, A. (2016). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32658/12312202%20Aucky%20Naryaya%20Muhammad.pdf?sequence=1>

- Nurbaverischa, Ardiani, S., & Nurhasanah. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kota Palembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11 51-64.
- Subhiningsih, R. A., Asnawi, S.K., & Sufyati, S. (2023). Factors Affecting Budget Absorption at Regional Apparatus Organizations. *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.31764/Jtam.V7i1.10267>
- Sukarningsih, S. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Polda Sumatera Utara (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15873>
- Suprptana, I. P. D., & Sujana, E. (2023). Asta Brata Moderates Budget Planning, Experience and Regulation of Budget Absorption During the Covid-19 Period. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 910–920. <https://doi.org/10.23887/Ijssb.V7i4.57722>
- Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat di Daerah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 135–144. <https://doi.org/10.37859/Jae.V12i1.3656>
- Tempo. (2023, September 1). Penyebab Rendahnya Realisasi Pendapatan Dan Belanja APBD. In Tempo.co. <https://www.tempo.co/info-tempo/penyebab-rendahnya-realisasi-pendapatan-dan-belanja-apbd-821124>. Diakses 20 Februari 2025.